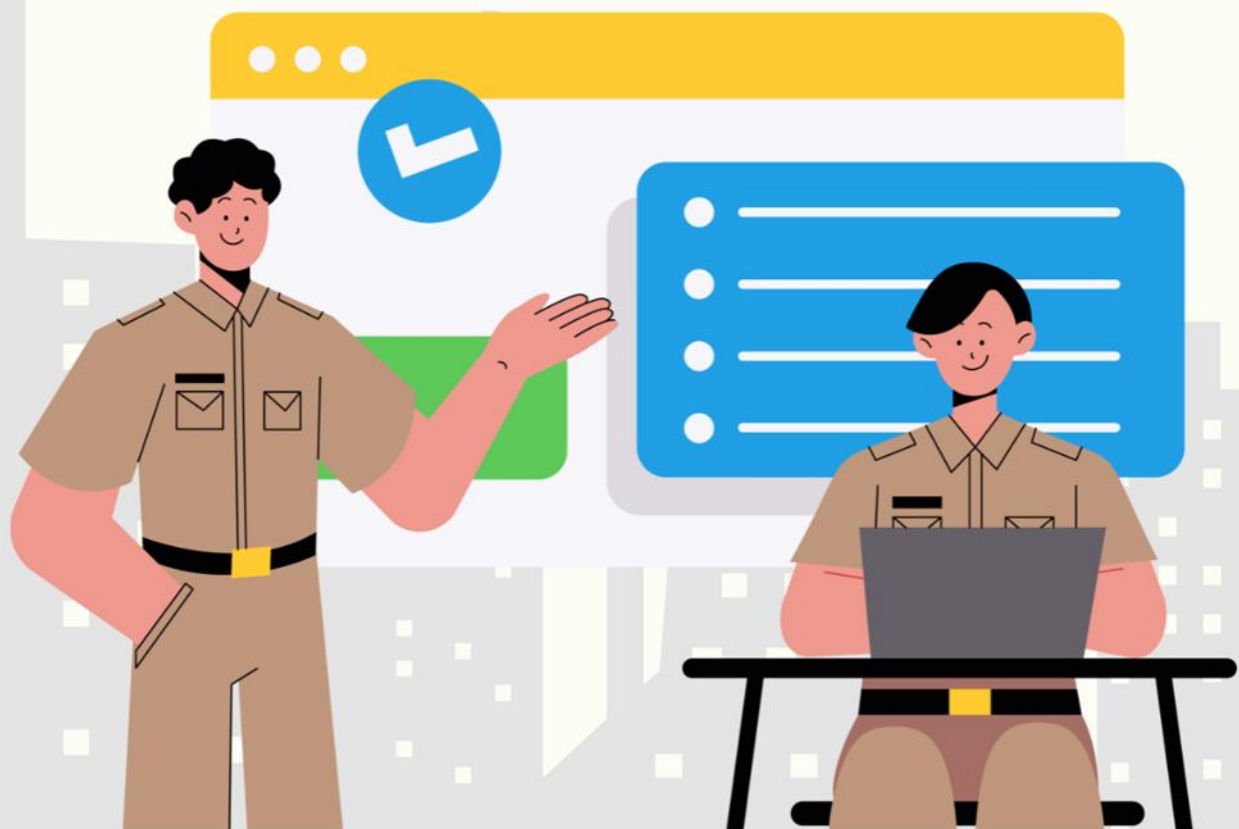


RENJA 2026



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
KOTA CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan instrumen penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renja Tahun 2026 menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Renja Tahun 2026 ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, DKIS Kota Cirebon berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD melalui penguatan layanan informasi publik, integrasi data sektoral, serta penerapan prinsip Pemerintah Digital (Pemdi) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Konsep Pemerintah Digital (Pemdi) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Transformasi menuju pemerintahan digital diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur, serta pengamanan infrastruktur siber guna mendukung keberlanjutan pelayanan publik digital yang andal dan inklusif.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah menjadi hal yang krusial. DKIS Kota Cirebon terus mendorong keterpaduan kebijakan, penyelarasan data dan sistem, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar transformasi digital berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah. Dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang produktif di Kota Cirebon.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta menjadi langkah

nyata dalam mendukung terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029.

Cirebon, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik Kota Cirebon

MA'RUF NURYASA, AP.,MM

NIP 19760330 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
1.1.2. Kewenangan	4
1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon 4	
1.2. Landasan Hukum.....	26
1.3. Maksud dan Tujuan.....	28
1.3.1. Maksud.....	28
1.3.2. Tujuan	29
1.4. Sistematika Penyusunan	29
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA RENJA TAHUN LALU	31
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025	31
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi DKIS.....	34
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Utama PD	41
3.3. Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	48
BAB V PENUTUP.....	49
LAMPIRAN - LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	34
Tabel 2. 1. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024.....	51
Tabel 2. 2. Evaluasi pelaksanaan Rencanaa Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025	75
Tabel 3. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD	43
Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama DKIS Kota Cirebon	44
Tabel 3. 3. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif DKIS 2026.....	47
Tabel 4. 1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	94

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Penyusunan Renja mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program strategis di bidang komunikasi publik, informatika, statistik sektoral, dan persandian. Rencana Kerja (Renja) DKIS Kota Cirebon Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah operasional tahunan yang lebih terukur dan terarah sesuai dengan tugas dan fungsi DKIS Kota Cirebon.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif. Dalam konteks tersebut, konsep Pemerintah Digital (Pemdi) menjadi arah strategis yang diusung oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam RPJMD 2025–2029, dengan tujuan membangun birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi semakin sentral sebagai motor penggerak digitalisasi pemerintahan daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang mencerminkan capaian, kendala, dan tantangan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur TIK, literasi digital aparatur yang belum merata, serta perlunya penguatan tata kelola data sektoral dan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Digital di Kota Cirebon.

Selain itu, dinamika pembangunan nasional dan provinsi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan daerah. Kebijakan nasional melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Digital menekankan pentingnya

interoperabilitas sistem, integrasi data, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi. DKIS Kota Cirebon memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan kebijakan tersebut di tingkat daerah, agar pelaksanaan transformasi digital dapat berjalan terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks tersebut, DKIS Kota Cirebon memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data statistik sektoral yang andal, serta penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaan Renja awal 2026 terdapat beberapa faktor yang memerlukan penyesuaian, antara lain perubahan struktur pendanaan, penajaman sasaran kegiatan prioritas, serta adanya program baru yang mendukung penguatan transformasi digital daerah.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi pemerintahan digital, memperluas jangkauan layanan informasi publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, serta memperkuat keamanan data dan informasi daerah. Renja ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mendorong percepatan terwujudnya Kota Cirebon Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029, sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Cirebon, adapun visi nya sebagai berikut **“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029”**. Sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dan Berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah **misi ke 3**, yaitu Mewujudkan

tata kelola pemerintahan Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Adapun tujuan DKIS adalah sebagai berikut **“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi”**

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merumuskan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digita (Pemdi);
- b. Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;
- c. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah;

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

A. Kedudukan

DKIS Kota Cirebon unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

B. Tugas dan Fungsi

DKIS Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKIS Kota Cirebon mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka BKPSDM Kota Cirebon memiliki kewenangan menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

A. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 6) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 7) Bidang Layanan E-Government;
- 8) Bidang PERSandian dan Keamanan Informasi;
- 9) UPT; dan
- 10)Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bidang Tugas Unsur Organisasi

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya

manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas. Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan fungsional dalam lingkup jabatannya. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Koordinator Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Keuangan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantuan, analitis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

II. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta hubungan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok JAbatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan

- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
- c. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.

1) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik meliputi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik, penguatan tata kelola komisi informasi di daerah kota, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik meliputi pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi

Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Kemitraan Komunikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kemitraan Komunikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Kemitraan Komunikasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi meliputi pelaksanaan layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;

- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi; dan;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

III. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan Domain, penatalaksanaan dan pengawasan serta sistem jaringan informatika. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi diberi tugas tambahan selaku coordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
- b. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan
- c. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.

1) Sub Koordinator Pengelolaan Domain

Sub Koordinator Pengelolaan Domain mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Domain;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pengelolaan Domain;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Pengelolaan Domain;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan domain meliputi pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pamantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Pengelolaan Domain;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika

Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup system jaringan informatika meliputi pelaksanaan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah kota;
- f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pamantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan system jaringan informatika; dan

- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

IV. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan tata kelola *e-government*, pengembangan ekosistem *e-government* serta pengembangan aplikasi. Kepala Bidang Layanan *E-Government* diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan *e-government*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang layanan *e-government*;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan *e-government*;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan *e-government*;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang layanan *e-government*;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Layanan *E-Government*, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh::

- a. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan
- c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.

a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup data Kelola *E-Government*;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup tata kelola *E-Government*;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup tata kelola *E-Government*;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-Government*; meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government*; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-government*; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data

Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan pusat data;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan pusat data;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;

- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan pusat data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data meliputi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pusat data pemerintah daerah kota, penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Kota, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas dan kota cerdas serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan aplikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan aplikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan aplikasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi meliputi pelaksanaan sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi; dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

V. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta layanan dan penyebarluasan data. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik Sektoral;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Statistik Sektoral, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data;
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan
- c. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.

a. Sub Koordinator Pengumpulan dan analisis Data

Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengumpulan dan analisis data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengumpulan dan analisis data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengumpulan dan analisis data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral serta membangun metadata statistik sektoral;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data

Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan dan penyebarluasan data;

- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral serta penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral

Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sumber daya statistik sektoral;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya statistik sektoral;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sumber daya statistik sektoral;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral meliputi peningkatan SDM Pemerintahan Daerah Kota dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi serta pengembangan infrastruktur;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

VI. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan

pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Persandian;
- b. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan
- c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.

a. Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup persandian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup persandian;kup persandian;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup persandian;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian meliputi pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Keamanan Informasi

Sub Koordinator Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota, pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota berbasis elektronik dan non elektronik

- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi

Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi meliputi pelaksanaan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Daerah Kota serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

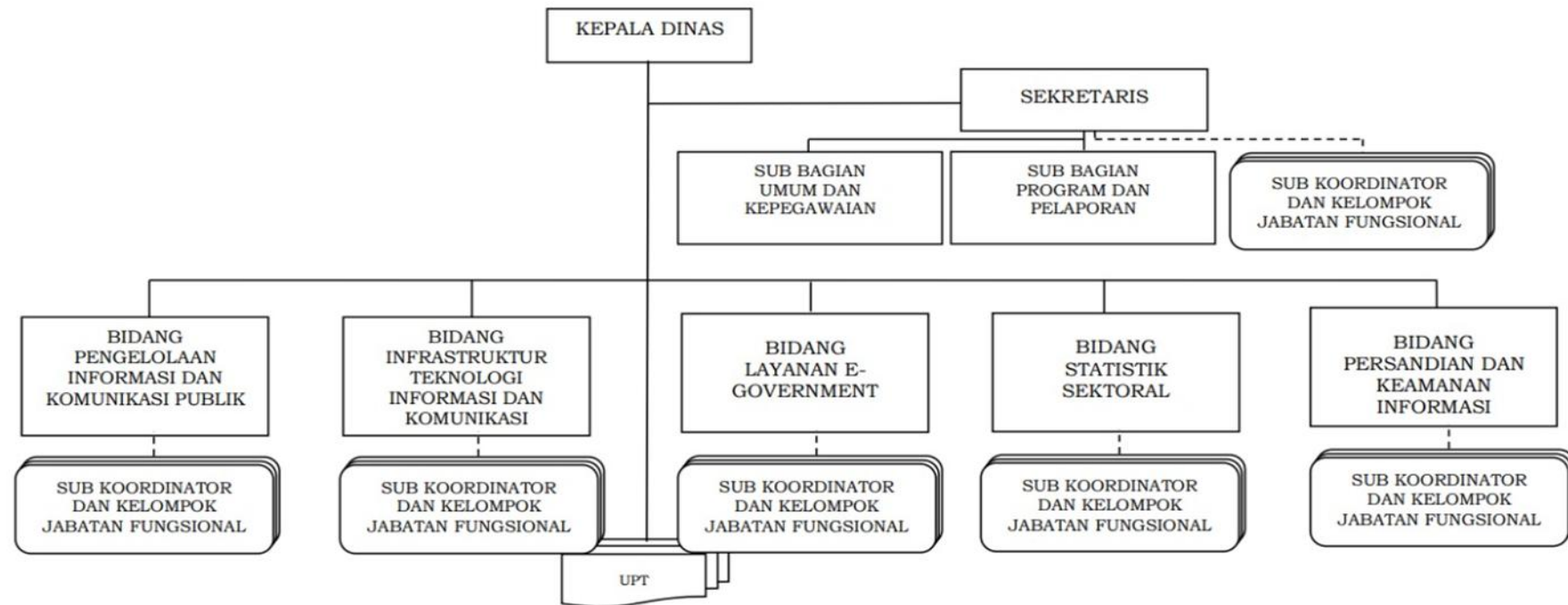
VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
 - Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 96 Tahun 2021
TANGGAL 29 Desember 2021



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan DKIS Kota Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 19;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 202
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Cirebon;
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Wali Kota Cirebon No 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun anggaran 2026. Renja ini menjadi dokumen perencanaan tahunan yang

berfungsi menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 ke dalam langkah-langkah yang lebih terukur dan implementatif.

Selain itu, penyusunan Renja juga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan kebijakan, program, dan kegiatan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029 ke dalam rencana kerja tahunan yang terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan tahun anggaran 2026;
3. Menyelaraskan arah kebijakan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, khususnya dalam implementasi Pemerintah Digital (Pemdi) dan Satu Data Indonesia;
4. Mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai penggerak transformasi digital daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital guna mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renja DKIS Kota Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja DKIS Tahun Lalu:
 - 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra DKIS (Tabel 2.1)
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 2.2)
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD (Tabel 2.3)
- Bab III Tujuan dan Sasaran
 - 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Tabel 4.1)
- Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL KINERJA RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025

Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DKIS Kota Cirebon. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DKIS Kota Cirebon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DKIS Kota Cirebon selama Tahun 2025 dan perkiraan target capaian Tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dengan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	BELANJA OPERASI	18.750.077.493	17.238.372.054
2.	BELANJA MODAL	514.169.151	499.505.600
TOTAL BELANJA		19.264.246.644	17.737.877.654

Dari jumlah dana tersebut, Belanja Operasi yang terdiri Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp 17.238.372.054 atau sekitar 91,94% sedangkan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp 499.505.600 atau sekitar 97,15 Total realisasi keuangan Belanja Operasi dan dan Belanja Modal adalah Rp 17.737.877.654 atau sekitar 92,08%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 (sebagaimana terlampir)

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2025 dengan Anggaran sebesar Rp. 23.055.133.314,00 namun dalam perjalanannya dilakukan efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sehingga anggaran belanja DKIS Kota Cirebon menjadi Rp.21.297.485.999,00 yang terealisasi sampai dengan Triwulan II atau Semester I sebesar Rp. 7.299.555.745,00 atau (34,27%). Program dan kegiatan adalah sebagai pelaksanaan pada setiap program dan kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilannya, maka program dan kegiatan yang disusun Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (sebagaimana terlampir).

BELANJA DAERAH		
1.1 BELANJA OPERASI	:	18.883.794.021
1.1.1 BELANJA PEGAWAI	:	9.731.387.577
1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA	:	8.162.406.564
1.1.3 BELANJA HIBAH	:	1.349.999.880
2.1 BELANJA MODAL	:	2.413.691.978
2.1.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	:	1.712.652.636
2.1.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	:	701.039.342
2.1.3 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	:	0
TOTAL BELANJA DAERAH	:	21.297.485.999

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon *tidak mempunyai SPM* maka pada tabel ini tidak diisi.

Tabel II. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	I KK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi DKIS

Isu-isu penting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sekaligus menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi), antara lain :
 - a. Masih terdapat Jaringan Intra yang menggunakan media akses wireless;
 - b. Masih terdapat layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. Penyebaran CCTV Cirebon Matahatiku belum merata;
 - d. Penyebaran free wifi masih belum merata dan sebagian besarnya masih milik swasta.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan, antara lain :
 - a. Masih rendahnya keterisian data pada Portal Cirebon Satu Data;
 - b. Tidak adanya standar data dan metadata sehingga terjadi duplikasi data yang tumpang tindih;
 - c. Masih kurangnya kualitas data yang diolah dan dikumpulkan karena belum sesuai dengan prinsip satu data;
3. Belum optimalnya penyebarluasan publikasi secara terintegrasi, antara lain:
 - a. Perencanaan konten belum disusun secara optimal
 - b. Penyusunan konten video tidak dapat terselesaikan sesuai jadwal
4. Belum optimalnya keamanan data dan informasi serta penanganan insiden keamanan informasi, antara lain :

- a. Masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
- b. Kebutuhan aplikasi pendukung keamanan informasi belum berlisensi
- c. Banyaknya Pengguna Sertifikat Elektronik yang Expired
- d. Masih masifnya insiden Keamanan Informasi
- e. Belum terlaksananya kegiatan Enkripsi Data

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Adapun capaian indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPD DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dengan target 100% dan nilai pagu anggaran murni sebesar Rp. 3.441.170.933 namun pada perjalanannya setelah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja sehingga pagu anggaran Program Aplikasi Informatika menjadi Rp. 2.874.977.084 terealisasi capaian target sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.73.684.401 (2,56%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 63.694.000 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.850.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (6%) kegiatan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dan Pengawasan Penggunaan Pengelolaan Sub Domain SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 16 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.811.283.684 (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

teralisasi sebesar Rp. 69.834.401 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) (2,48%) kegiatan yang telah dilaksanakan Diskusi Pembangunan CMS dengan IT Genic, Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Mini Command Center DKIS dan penyelenggaraan Layanan Sistem Informasi Kota Cerdas. Kegiatan yang dilakukan yaitu belanja honorarium non ASN Operator Komputer Mini Command Center (MCC), Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil). Kegiatan ini diikuti oleh anggota Relawan TIK dan anak yatim piatu yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Ramadhan, Kegiatan Rapat Evaluasi SIKOPER, Pemasangan perangkat router jaringan, Konfigurasi perangkat jaringan dan Test bandwidth melalui jaringan wireless dan Lan.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 2,98 poin dan nilai pagu anggaran murni sebesar Rp. 409.655.806 namun pada perjalanannya setelah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja sehingga pagu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menjadi Rp. 315.439.513 terealisasi capaian target 2,98 poin dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.062.900 (18,08%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II meliputi penyelenggaraan rapat Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan penyusunan Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 dengan nilai anggaran Rp.111.020.579 terealisasi sebesar Rp. 46.332.900.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan nilai anggaran Rp. 80.427.889 terealisasi sebesar Rp. 4.230.000. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II meliputi honorarium pegawai Non ASN untuk jabatan Pengelola Data Geospasial selama 6 (enam) bulan, pengadaan tas peserta kegiatan pelatihan dan

baju taktikal bagi pegawai pada Bidang Statistik Sektoral, serta pelaksanaan pelatihan pengolahan data.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan nilai anggaran sebesar Rp. 104.138.498 terealisasi Rp. 4.500.000. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II meliputi penyelenggaraan Desk e-Walidata dan pengadaan perangkat pendukung pengolah data berupa UPS dan kamera digital.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan nilai anggaran Rp. 11.468.861 Belum ada realisasi.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar dengan nilai anggaran Rp. 8.383.686 terealisasi sebesar Rp. 2.000.000. Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II meliputi penyelenggaraan rapat penentuan dan penetapan lokasi fokus (lokus) penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025, serta Sosialisasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025.

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 1 (satu) indikator , yaitu Indeks keterbukaan informasi publik dengan target 94 Poin. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.632.367.460 namun pada perjalanannya setelah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja sehingga pagu anggaran Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp.4.170.707.202 terealisasi sebesar Rp 1.426.746.960 atau 34,20 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Media Gathering
- Forum Silaturahmi Pimpinan Redaksi
- Publikasi Festival Milm Kampung
- Kegiatan Pelayanan Informasi Publik telah dilaksanakan pekerjaan rapat evaluasi layanan Cirebon siaga 112, SP4N LAPOR dan PPID

- pemantauan isu publik pada media cetak dan media online yang dilaksanakan setiap harinya
 - Publikasi konten mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon mencakup infografis dan artikel edukatif
 - Publikasi Media Cetak, Online dan Elektronik
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki 1 (satu) indikator Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon 93% dan 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.482.211.336 namun pada perjalanannya setelah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan penyesuaian efisiensi belanja sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 1.270.794.052 terealisasi sebesar Rp.158.039.814 atau 12,43%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 1.265.444.052,00 terealisasi sebesar Rp 158.039.814,- pada Triwulan II Tahun 2025 sub kegiatan dimaksud adalah :
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Audit Surveillance ISO 27001:2022 yang akan dilaksanakan pada Triwulan III
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sosialisasi SMKI, Audit Internal ISO 27001:2022 yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE), Pelaksanaan Layanan Pentest

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan konsultasi dan pengecekan persyaratan Sandi Data dari BSSN sebagai implementasi dari penerapan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi pada aplikasi SIMPEG milik Pemerintah Kota Cirebon. Kegiatan sandi data, atau kriptografi, adalah suatu teknik untuk melindungi data dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian maka usulan program/ kegiatan pada DKIS Kota Cirebon tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Dalam urusan komunikasi dan informatika, DKIS Kota Cirebon memiliki tanggung jawab dalam memastikan terselenggaranya komunikasi publik yang efektif serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat proses administrasi pemerintahan. Digitalisasi layanan publik seperti e-Government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengelolaan media komunikasi pemerintah menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital.

Pada urusan statistik, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bertanggung jawab dalam pengelolaan data statistik sektoral yang digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data (*data-driven policy*). Dengan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, urusan persandian menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah. Ancaman siber yang semakin kompleks menuntut penguatan sistem keamanan informasi agar data pemerintahan tetap terjaga dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, implementasi teknologi keamanan digital serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data menjadi agenda prioritas dalam mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya.

Adapun program nasional yang dilaksanakan DKIS Kota Cirebon termasuk dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Program yang dijalankan antara lain : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik

Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Program-program yang dijalankan oleh DKIS Kota Cirebon menjadi dukungan kepada program nasional yaitu Transformasi Digital. Dengan adanya sinergi antara urusan komunikasi informatika, urusan statistik, dan urusan persandian, diharapkan transformasi digital di Kota Cirebon dapat berjalan secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat daya saing Kota Cirebon di era digital.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital yang efektif, transparan, dan berdaya saing, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon perlu memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang dikelola tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi berbasis kinerja menjadi sangat penting dalam menilai sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada teknologi dan data.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Utama PD

Tujuan Strategis DKIS Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Misi Wali Kota Cirebon yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “ **Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman) berkelanjutan tahun 2029**”

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut Adalah :

- (1) **Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing:** Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter.
- (2) **Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal :** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.

- (3) **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
- (4) **Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan**: Menciptakan lingkungan kota yang berkelanjutan dan berketahanan.
- (5) **Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal**: Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DKIS Kota Cirebon dalam melaksanakan manajemen ASN adalah **Misi 3** yaitu “ **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**”

Tujuan Misi ke 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sedangkan *sasaran* daripada misi ke 3 yaitu Indeks SPBE (Pemerintah Digital).

Beranjak dari Misi Ke Tiga , maka tujuan strategis tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh DKIS Kota Cirebon adalah “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi”. Adapun sasaran strategis dari tujuan dimaksud yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi);
2. Meningkatkan penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;
4. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
5. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan hubungan antara Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah DKIS Kota Cirebon dengan RPJMD kota Cirebon dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

RPJMD KOTA CIREBON 2025-2029	PENYESUAIAN RENSTRA DKIS 2025-2029
VISI	
Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA (Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman) berkelanjutan tahun 2029”	
MISI 3	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
TUJUAN	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	
SASARAN	TUJUAN
Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital didukung oleh layanan statistik yang akurat dan andal serta peningkatan keamanan informasi
	SASARAN
	1.1. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)
	1.2. Meningkatnya pengelolaan layanan

	informasi dan komunikasi publik
	1.3. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
	1.4. Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	1.5. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
	INDIKATOR SASARAN
	1.1. Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan
	1.2. Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)
	1.3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
	1.4. Nilai Indeks Keamanan Informasi
	1.5. Indeks Kematangan Organisasi

Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama DKIS Kota Cirebon

NO.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
						Satuan	2026
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada				Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	3,00

NO.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
						Satuan	2026
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
	pelayanan publik yang berkualitas						
		1.1.	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	1.1.	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	persen	100
		1.2.	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	1.2.	Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)	Poin	95
		1.3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,00
		1.4	Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.4	Nilai Indeks Keamanan Informasi		
		1.5	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1.5	Indeks Kematangan Organisasi	Poin	45

3.2.1 **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025-2029 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan tersebut adalah :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

3.2.2 **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh DKIS Kota Cirebon adalah:

1. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi);
2. Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;
3. Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
5. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKIS Kota Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada DKIS Kota Cirebon serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif

Tabel
Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Pagu Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Cirebon Tahun 2026

No	Bagian	Urusan			Non Urusan			Urusan dan Non Urusan		
		Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon	4	6	6.158.888.118	1	8	10.381.248.564	5	14	16.540.136.682

Tabel 3. 3. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif DKIS 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan DKIS Kota Cirebon Tahun 2026, dapat dilihat pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada lampiran Tabel 4.1. (sebagaimana terlampir)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kondisi aktual, baik yang bersumber dari hasil evaluasi kinerja, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang semakin meningkat di era transformasi digital.

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dapat lebih terarah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Renja Perubahan ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan komitmen, kolaborasi, dan koordinasi yang kuat antar bidang di lingkungan perangkat daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai kinerja yang optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cirebon.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 2. 1. Realisasi program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TIN RE
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2.16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon	RPD : - Melaksanakan manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Menjadikan website dan media sosial Pemda Kota Cirebon sebagai rujukan utama dalam mengakses informasi publik. - Menjadikan Cirebon Satu Data sebagai sumber data utama dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan peningkatan layanan persandian dan keamanan informasi								
			- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan - Meningkatkan manajemen	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan :						

			sumber daya manusia aparatur - Meningkatkan manajemen keuangan							
					- Dana Hasil: - indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 11.497.688.858,00 80 Persen	Rp 10.703.094.766,00 86,6 persen			
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 188.264.389,00 7 Jenis	Rp 175.311.889,00 7 jenis			
				1. sub kegiatan Penyusunan 1. Dokumen Perencanaan 1. Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13.996.875,00 5 Dokumen	Rp 12.297.200,00 5 dokumen			
				1. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1. 2	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.687.350,00 1 Dokumen	Rp 3.154.950,00 1 dokumen			
				1. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1. 3	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 3.637.950,00	Rp 3.154.950,00			

					- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen			
				1. sub kegi atan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 3.637.850,00 1 Dokumen	Rp 3.154.950,00 1 dokumen			
				1. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.637.850,00 1 Dokumen	Rp 3.154.950,00 1 dokumen			
				1. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 16.860.000,00	Rp 10.860.000,00			
				1. sub kegiat an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan :					

					- Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 142.806.514,00 6 Laporan	Rp 139.534.889,00 6 laporan			
				1. 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : - Dana	Rp 8.603.274.394,00	Rp 8.055.331.462,00			
					Keluaran : - Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	3 Jenis	3 jenis			
				1. sub kegiatan Penyediaan 2. Gaji dan Tunjangan ASN 1	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.595.049.294,00 52 Orang/bulan	Rp 8.047.106.362,00 52 orang/bulan			
				1. sub kegiatan Koordinasi 2. dan Penyusunan Laporan 2. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.993.000,00 1 Laporan	Rp 2.993.000,00 1laporan			
				1. sub kegiatan Koordinasi 2. dan Penyusunan Laporan 3. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 5.232.100,00	Rp 5.232.100,00			

					- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 laporan			
				1. 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp -	Rp -	Terjadi recofusing anggaran sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	
					- Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	0 jenis	0 jenis			
				1. sub kegiatan Pengamanan 3. Barang Milik Daerah SKPD 1	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp - 0 Dokumen	Rp - 0 dokumen	Terjadi recofusing anggaran sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	
				1. 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Dokumen Kepegawaian aparatur daerah	Rp 55.198.100,00 2 paket	Rp 52.625.000,00 2 paket			
				1. sub kegiatan Pengadaan 4. Pakaian Dinas Beserta 1 Atribut Kelengkapannya	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 55.198.100,00	Rp 52.625.000,00			

					- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket			
				1. 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 906.909.915,00	Rp 795.525.336,00			
					- Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	6 jenis			
				1. sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 60.341.814,00 1 Paket	Rp 59.477.800,00 1 paket			
				1. sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 4.629.600,00 1 Paket	Rp 4.500.000,00 1 paket			
				1. sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 105.645.275,00 2 Paket	Rp 103.112.700,00 2 paket			
				1. sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan : - Dana	Rp 23.136.000,00	Rp 23.136.000,00			

					Keluaran :					
					- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 dokumen			
				1. sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Kunjungan Tamu 5	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 61.500.000,00 12 Laporan	Rp 36.500.000,00 12 laporan	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	Optimalisasi penggunaan anggaran	
				1. sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6	Masukan : - Dana Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 651.657.226,00 12 Laporan	Rp 568.798.836,00 12 laporan			
				1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6	Masukan : - Dana	Rp -	Rp -	Terjadi recofusing anggaran sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	
					Keluaran : Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0	0			
				1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel 6. Mebel 1	Masukan :			Terjadi recofusing anggaran sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	

					- Dana Keluaran : - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp - Rp0	Rp - 0			
				1. sub kegiatan Pengadaan 6. Sarana dan Prasarana 2. Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp - Rp0	Rp - 0	Terjadi recofusing anggaran sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya	
				1. Kegiatan Penyediaan 7. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 997.137.425,00 2 Jenis	Rp 932.529.879,00 2 jenis			
				1. Sub Kegiatan Penyediaan 7. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 388.344.000,00	Rp 326.342.729,00			
					- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan			
				1. Sub kegiatan Penyediaan 7. Jasa Pelayanan Umum 2. Kantor	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 608.793.425,00	Rp 606.187.150,00			

					- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan			
				1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 746.904.635,00 5 Jenis	Rp 691.771.200,00 5 jenis		
				1.8.1	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 45.654.500,00 1 Unit	Rp 40.756.000,00 1 unit		
				1.8.2	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : - Dana	Rp 375.349.200,00	Rp 364.364.600,00		
					Keluaran : - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 unit			
				1.8.3	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan :				

					- Dana Keluaran : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 166.684.135,00 4 Unit	Rp 164.314.600,00 4 unit			
				1. sub kegiatan 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi 4 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 101.872.800,00	Rp 82.886.000,00			
					- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 unit			
				1. sub kegiatan 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi 5 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 57.344.000,00 54 Unit	Rp 39.450.000,00 54 unit	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	Optimalisasi penggunaan anggran	
			Melakukan layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta Melakukan penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Masukan :					

					- Dana Hasil	Rp 3.388.304.358,00	Rp 3.043.366.094,00			
					Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintahan daerah	87 Persen	87 persen			
				2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : - Dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 3.388.304.358,00 13 Dokumen	Rp 3.043.366.094,00 13 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 5.774.500,00 1 Dokumen	Rp 5.774.500,00 1 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 63.898.266,00 16 dokumen	Rp 63.898.266,00 16 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana	Rp 5.774.500,00	Rp 5.774.500,00			

					Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 107.906.506,00 12 Dokumen	Rp 107.906.506,00 12 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 977.756.872,00 12 Dokumen	Rp 727.756.872,00 12 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Rp 354.738.884,00 12 Dokumen	Rp 354.738.884,00 12 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 317.219.775,00 1 Dokumen	Rp 317.219.775,00 1 Dokumen			
				2. Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Masukan :					

					- Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Rp 18.904.850,00 1 Dokumen	Rp 18.904.850,00 1 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 1. 10	Masukan : - Dana Keluaran : - Terpenuhiya Sumber Daya Komunikasi Publik yang Kompeten	Rp 20.684.500,00 111 Orang	Rp 12.684.500,00 111 orang			
				2. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1. 11	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp 1.299.999.880,00 1 Dokumen	Rp 1.214.112.416,00 1 dokumen			
				2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas 1. 12	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 215.645.825,00	Rp 214.595.025,00			
					- Jumlah Dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen			

			Melaksanakan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	3	Program Aplikasi Informatika	Masukan : - Dana Hasil : - Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi - Presentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	Rp 3.197.164.490,00 38 Persen 100 Persen	Rp 2.924.424.874,00 38 persen 100 persen			
				3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Outcome - Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh perangkat daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	Rp 1.714.034.798,00 32 Perangkat Daerah	Rp 1.683.703.198,00 32 perangkat daerah			
				3.1.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran - Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 50.505.000,00 3 Domain	Rp 49.255.000,00 3 domain			

				3. Sub Kegiatan 1. Penatalaksanaan dan 2. Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53.264.000,00 2 Dokumen	Rp 36.624.000,00 2 dokumen	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	Optimalisasi penggunaan anggran	
				3. Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Sistem 3 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan :					Si m n Men unt pra t fasil dis d der sur s inte me rua d ke cira Se Wal Tah Pe Pem Cir (Insta M V Cireb

										a ada eval da CCT Pem da dila DKIS p b. k Pem Kot me
					- Keluaran :	Rp 1.610.265.798,00 54 Unit	Rp 1.597.824.198,00 54 unit			MAT Peny are dis Dina persi Di Swa 52
			Melaksanakan penyelenggaraan pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	3. 2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 1.483.129.692,00 Rp 1.240.721.676,00			
					- Jumlah Sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah)	3 layanan	3 layanan			

				3. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana	Rp 44.496.625,00	Rp 20.167.750,00	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	Optimalisasi penggunaan anggaran	
					Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1dokumen			
				3. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 4.999.150,00 1 Dokumen	Rp - 0 dokumen	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	Optimalisasi penggunaan anggaran	
				3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rp 341.865.916,00 1 Unit	Rp 325.230.000,00 1 unit			
				3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana	Rp 4.999.150,00	Rp -	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	optimalisasi penggunaan anggaran yang terealisasi	

					Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 dokumen			
				3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem 2. Keamanan Informasi 5	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rp 10.000.000,00 1 Dokumen	Rp - 0 dokumen	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	optimalisasi penggunaan anggaran yang terealisasi	
				3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 2. 6	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp 10.000.000,00 2 Perangkat Daerah	Rp - 0 perangkat daerah	Penyerapan Anggaran Sesuai Kebutuhan	optimalisasi penggunaan anggaran yang terealisasi	
				3. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. 7	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Rp 256.300.048,00 5 Unit	Rp 155.114.548,00 5 unit	Pembatasan pencairan GU, untuk efisiensi anggaran	Akan diusulkan tahun berikutnya sesuai kebutuhan	
				3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2. 8	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp - -	Rp - -	Pembatasan pencairan GU, untuk efisiensi anggaran	Akan diusulkan tahun berikutnya sesuai kebutuhan	

					- Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Layanan	0 layanan			
				3. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Rp 558.973.803,00 1 dokumen	Rp 542.415.978,00 1 dokumen			
				3. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 240.000.000,00	Rp 186.298.400,00			
					- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
				3. Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Masukan : - Dana Keluaran : - Laporan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp 4.997.500,00 1 dokumen	Rp 4.997.500,00 1 dokumen			

				3. 2. 12	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 6.497.500,00	Rp 6.497.500,00		
						- Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 dokumen	1 dokumen		
2.20	STATISTIK		Renstra : - Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral kepada stakeholder berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Masukan :				
						- Dana Hasil : Presentase penyelenggaraan statistik sektoral	Rp 398.877.203,00 100 Persen	Rp 322.691.185,00 100 persen		
				4. 1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : - Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi, metadata)	Rp 398.877.203,00 4 Dokumen	Rp 322.691.185,00 4 dokumen		
				4. 1. 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Masukan : - Dana	Rp 185.944.804,00	Rp 113.148.786,00	Pembatasan pencairan GU, untuk efisiensi anggaran	Akan diusulkan tahun berikutnya sesuai kebutuhan

					Keluaran: - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	2 dokumen			
				4. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp 46.940.950,00	Rp 46.940.950,00			
					- Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	84 Orang	84 Orang			
				4. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp 18.475.975,00 1 Dokumen	Rp 18.475.975,00 1 dokumen			
				4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan : - Keluaran : - Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Rp 11.779.650,00 32 Orang	Rp 11.529.650,00 32 orang			
				4. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Infrastruktur Statistik	Rp 52.032.449,00 1 Unit	Rp 51.892.449,00 1 unit			

				4. 1. 6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp 83.703.375,00 1 Dokumen	Rp 80.703.375,00 1 dokumen		
2.21	PERSANDIAN		Renstra : Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE	5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Masukan : - Dana Hasil Persentase terselenggaranya layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah kota cirebon	Rp 782.211.735,00 86 Persen	Rp 744.300.735,00 80 persen		
				5. 1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : Jumlah Layanan persandian dan keamanan informasi di pemerintah daerah kota cirebon	Rp 715.320.211,00 13 Layanan	Rp 677.409.211,00 12 layanan		
				5. 1. 1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana	Rp 198.866.500,00	Rp 173.564.500,00		

					Keluaran :					
					- Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1Dokumen	1 Dokumen			
				5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan :					
				1.						
				2.						
					- Dana	Rp 315.940.800,00	Rp 314.190.800,00			
					Keluaran :					
					- Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3Laporan			
				5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan :					
				1.						
				3.						
					- Dana	Rp 36.009.200,00	Rp 32.045.200,00			
					Keluaran :					
					- Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan			
				5. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan :					
				1.						
				4.						
					- Dana	Rp 164.503.711,00	Rp 157.608.711,00			
					Keluaran :					

					- Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah	32 perangkat daerah			
				5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah pemanfaatan layanan hubungan komunikasi sandiantar perangkat daerah	Rp 66.891.524,00 1 Layanan	Rp 66.891.524,00 1 layanan		
				5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rp 66.891.524,00 32 Perangkat Daerah	Rp 66.891.524,00 32 perangkat daerah		
						Rp19.264.246.644	Rp17.737.877.654			

Tabel 2. 2. Evaluasi pelaksanaan Rencanaa Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masukan : - Dana Outcome: - indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 12.665.568.148 80 Persen	Rp 5.584.021.670 84,26 persen		
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 71.107.330 7 jenis	Rp 55.454.300 2 jenis		
		1.1.1 sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.242.220 5 Dokumen	Rp 4.000.000 2 dokumen		
		1.1.2 sub kegiatan Koordinasi dan Peny usunan Dokumen RKA- SKPD	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.898.324 1 Dokumen	Rp - 0 dokumen		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		1.1.3 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Masukan : - Dana	Rp 1.898.324	Rp -		
			Ouput : - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 dokumen		
		1.1.4 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan : - Dana	Rp 1.898.324	Rp -		
			Ouput : - Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 dokumen		
		1.1.5 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan : - Dana	Rp 1.898.324	Rp -		
			Ouput : - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 dokumen		
		1.1.6 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : - Dana	Rp 7.711.620	Rp 5.605.000		
			Ouput : - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 laporan		
		1.1.7	Masukan :				

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Ouput :	Rp 48.560.194	Rp 45.849.300		
			- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 laporan		
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	Rp 9.374.996.521 3 Jenis	Rp 4.759.688.775 0 jenis		
		1.2.1 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.371.387.577 52 Orang/bulan	Rp 4.759.688.775 52 orang/bulan		
		1.2.2 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.276.800 1 Laporan	Rp - 0 laporan		
		1.2.3 sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 2.332.144 12 Laporan	Rp - 0 laporan		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
		1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp - 0 jenis	Rp - 0 jenis		
		1.3.1 sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp - 0 Dokumen	Rp - 0 dokumen		
		1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen Kepegawaian aparatur daerah	Rp - 0	Rp - 0		
		1.4.1 sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp - 0	Rp - 0		
		1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Ouput :	Rp 621.915.660	Rp 188.286.150		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			- Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	6 jenis		
		1.5.1 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 61.011.875 1 Paket	Rp 56.627.950 1 paket		
		1.5.2 s ub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 4.478.502 1 Paket	Rp 900.000 1 paket		
		1.5.3 sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 123.365.900 2 Paket	Rp 38.002.500 1 paket		
		1.5.4 sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 23.928.000 12 Dokumen	Rp 7.976.000 6 dokumen		
		1.5.5	Masukan :				

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Dana Ouput : - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 30.000.000 12 Laporan	Rp 6.500.000 6 laporan		
		1.5.6 sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : - Dana Ouput : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 379.131.383 12 Laporan	Rp 78.279.700 6 laporan		
		1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana Ouput : Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 26.585.575 4 unit	Rp - 0		
		1.6.1 sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Ouput : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 26.585.575 4 unit	Rp - 0		
		1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.137.165.420 2 Jenis	Rp 347.157.765 2 jenis		
		1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : - Dana	Rp 434.101.000	Rp 113.839.765		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Ouput :				
			- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 laporan		
		1.7.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 703.064.420 12 Laporan	Rp 233.318.000 6 laporan		
		1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.433.797.642 5 Jenis	Rp 233.434.680 4 jenis		
		1.8.1 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 71.161.000 1 Unit	Rp 7.740.000 1 unit		
		1.8.2 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp 388.261.000 28 Unit	Rp 143.314.200 12 unit		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
		1.8.3 sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 770.862.918 4 Unit	Rp - 0 unit		
		1.8.4 sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 98.894.724 13 Unit	Rp 66.229.680 13 unit		
		1.8.5 sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 104.618.000 54 Unit	Rp 16.150.800 20 unit		
		2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Masukan : - Dana Outcome Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Rp 4.170.707.202 87 Persen	Rp 1.426.746.960 46,27 persen		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			pemerintah dan pemerintahan daerah				
		2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 4.170.707.202 13 Dokumen	Rp 1.426.746.960 8 dokumen		
		2.1.1 Sub Kegiatan Relasi Media	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Rp 248.895.625 1 Laporan	Rp 178.697.000 1 Laporan		
		2.1.2 Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Rp 142.318.702 22 Komunitas	Rp 12.348.320 22 Komunitas		
		2.1.3 Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di	Rp 1.299.999.880 1 laporan	Rp 632.884.640 1 laporan		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				
		2.1.4 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Rp 667.285.080 185 Permohonan	Rp 96.642.000 101 Permohonan		
		2.1.5 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Rp 2.261.315 100 Persen	Rp 2.000.000 100 Persen		
		2.1.6 Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rp 32.494.900 12 Rekomendasi	Rp 8.944.000 6 Rekomendasi		
		2.1.7 Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Masukan : - Dana Ouput : - Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Rp 365.043.900 70 Persen	Rp 94.554.000 46,27 Persen		
		2.1.8 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masukan : - Dana	Rp 1.224.698.840	Rp 249.196.000		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Ouput :				
			- Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	73 Media	73 Media		
		2.1.9 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Rp 10.324.660 12 Dokumen	Rp 4.800.000 6 Dokumen		
		2.1.10 Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Konten Informasi Publik	Rp 165.569.000 365 Konten	Rp 146.681.000 160 Konten		
		2.1.11 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Rp 11.815.300 64 Orang	Rp - 0 Orang		
		3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Masukan : - Dana Outcome - Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi - Presentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	Rp 2.874.977.084 38 Persen 100 Persen	Rp 73.684.401 38 persen 100 persen		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Outcome - Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh perangkat daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	Rp 63.694.000 32 Perangkat Daerah	Rp 3.850.000 32 perangkat daerah		
		3.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Output - Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Rp 63.694.000 1 Dokumen	Rp 3.850.000 1 Dokumen		
		3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Output : - Jumlah Sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah)	Rp 2.811.283.084 3 layanan	Rp 69.834.401 3 layanan		
		3.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Masukan : - Dana Output : - Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Rp - 0 Aplikasi	Rp - 0 Aplikasi		
		3.2.2	Masukan :				

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis	- Dana Ouput : - Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Rp -	Rp -		
		3.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp 671.686.750 2 Laporan	Rp - 0 Laporan		
		3.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Rp - 0Dokumen	Rp - 0 Dokumen		
		3.2.5 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Rp 110.240.164 1 Dokumen	Rp - 0 Dokumen		
		3.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp - 0 Dokumen	Rp - 0 Dokumen		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		3.2.7 Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp 160.000.000 2 Aplikasi	Rp - 0 Aplikasi		
		3.2.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp - 0 Aplikasi	Rp - 0 Aplikasi		
		3.2.9 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Rp - 0 Unit	Rp - 0 Unit		
		3.2.10 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 622.820.845 32 Perangkat Daerah	Rp 29.244.000 32 Perangkat Daerah		
		3.2.11 Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal	Masukan : - Dana	Rp -	Rp -		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Ouput : - Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0 Layanan	0 Layanan		
		3.2.12 Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp - 0 dokumen	Rp - 0dokumen		
		3.2.13 Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Rp 120.846.800 3 Program	Rp 30.590.401 1 Program		
		3.2.14 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp 29.200.000 1 dokumen	Rp 10.000.000 0 dokumen		
		3.2.15 Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Masukan : - Dana Ouput :	Rp - 	Rp - 		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			- Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	0Aplikasi	0 Aplikasi		
		3.2.16 Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Rp 1.096.488.525 32 Perangkat Daerah	Rp - 0 Perangkat Daerah		
STATISTIK		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi, metadata)	Rp 315.439.513 4 Dokumen	Rp 57.062.900 0 dokumen		
		4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi, metadata)	Rp 315.439.513 4 Dokumen	Rp 57.062.900 3 dokumen		
		4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Rp 111.020.579 32 Orang	Rp 46.332.900 32 Orang		
		4.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Masukan : - Dana	Rp 80.427.889	Rp 4.230.000		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Ouput :				
			- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	75 Persen	75 Persen		
		4.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Masukan : - Dana Ouput : - Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Rp 104.138.498 75 Persen	Rp 4.500.000 75 Persen		
		4.1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Rp 11.468.861 1 Dokumen	Rp - 0 Dokumen		
		4.1.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Rp 8.383.686 1 Dokumen	Rp 2.000.000 1 Dokumen		
PERSANDIAN		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Masukan : - Dana Outcome Persentase terselenggaranya layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon	Rp 1.270.794.052 86 Persen	Rp 158.039.814 86 persen		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
		5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : Jumlah Layanan persandian dan keamanan informasi di pemerintah daerah kota cirebon	Rp 1.265.444.052 13 Layanan	Rp 158.039.814 13 layanan		
		5.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rp 151.805.864 1Dokumen	Rp - 0 Dokumen		
		5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.650.000 3 Laporan	Rp - 0 laporan		
		5.1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53.580.000 1 Laporan	Rp - 0 laporan		

	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
2	3	5	6	7	8	24	25
			Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
		5.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Rp 1.045.408.188 32 Perangkat Daerah	Rp 158.039.814 32 perangkat daerah		
		5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah pemanfaatan layanan hubungan komunikasi sandiantar perangkat daerah	Rp 5.350.000 1 Layanan	Rp - 0 layanan		
		5.2.1 Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana Ouput : - Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rp 5.350.000 32 Perangkat Daerah	Rp - 0 perangkat daerah		
				Rp 21.297.485.999	Rp 7.299.555.745	34,27	

Tabel 4. 1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							21.126.236.960,00						24.777.167.982,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.126.236.960,00							24.777.167.982,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						19.432.976.428,00							23.606.943.256,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.612.688.944,00						-	13.061.914.331,00	
		[Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan]	Indeks Kematangan Organisasi	40	44	44	45	12.612.688.944,00	-	-	-	-	-	-	13.061.914.331,00	-
	2.16.01.2.01	Penencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	76.547.136,00			-	-	-	-	140.022.790,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Penencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Penencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.242.220,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.531.917,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.646.324,00	Kota Cirebon, Kasimbi, Kasimbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.965.617,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.646.324,00	Kota Cirebon, Kasimbi, Kasimbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.206.556,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.646.324,00	Kota Cirebon, Kasimbi, Kasimbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.659.556,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.646.324,00	Kota Cirebon, Kasimbi, Kasimbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.212.310,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD														

SKPD-RI : diacak pada 2026-01-07 08:24:29

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.711.620,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.529.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	40.000.000,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.917.466,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.374.996.521,00			-	-	-	-	9.627.369.786,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	9.371.367.577,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.617.357.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.276.800,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.645.181,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	2.332.144,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.367.552,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.730.299,00			-	-	-	-	27.016.814,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.730.299,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.016.814,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	72.930.375,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	0,00	Kota Cirebon, Kasembi, Kasembi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.930.375,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	646.106.933,00			-	-	-	-	766.545.167,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Penlelben dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Penlelben dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.011.875,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.041.153,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.475.502,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.158.365,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	115.650.556,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		122.525.084,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penulisan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penulisan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	23.928.000,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.525.631,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.465.168,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	410.000.000,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		506.629.746,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	233.180.911,00			-	-	-	-	272.342.046,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	33.180.911,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.242.163,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Cirebon, Kaseambi, Kaseambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		243.069.863,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.091.384.420,00			-	-	-	-	1.049.583.205,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	388.320.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		381.076.525,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	703.064.420,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		686.506.680,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Bering Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.064.740.724,00			-	-	-	-	1.123.204.149,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.839.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.649.653,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya				28 Unit	386.261.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		404.301.689,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	475.000.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		514.622.485,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	96.894.724,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.565.985,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				54 Unit	56.746.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.064.337,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						2.816.854.917,00						-	3.876.806.146,00	
		[Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	96,5	97	98	98,5	2.816.854.917,00	-	-	-	-	-	-	3.876.806.146,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.816.854.017,00			-	-	-	-	3.876.806.146,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. berakreditasi di pers, dan 2. terdapat di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	146.895.625,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		227.716.772,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendistribusikan informasi dan terdapat di Dinas Kominfo				22 Komunitas	32.940.637,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		253.432.962,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Kominfo Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Sengikta Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Kominfo Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.037.866.500,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.967.962.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				185 Permohonan	621.485.080,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.229.070,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pembacaan khlayak sasaran yang meliputi informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Pembacaan	2.261.315,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.685.385,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan status agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	32.494.900,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		142.252.529,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Pembacaan khlayak yang meliputi informasi publik				70 Pembacaan	205.134.000,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		713.058.413,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai Anteraja/Unit				73 Media	543.190.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.021.596,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				12 Dokumen	9.124.690,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.665.264,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				365 Konten	76.444.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144.526.051,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang didaslat mengikuti bimbingan/pelatihan				64 Orang	7.015.300,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.235.661,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						4.163.432.467,00						-	6.661.122.779,00	
		[Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika]	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100 44	100 38	100 38	100 40	4.163.432.467,00	-	-	-	-	-	-	6.661.122.779,00	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dilepaskan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.000.000,00			-	-	-	-	120.222.077,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	105.000.000,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.222.077,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.996.432.467,00			-	-	-	-	6.530.900.702,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	1.227.882.452,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.315.092.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	186.304.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		630.299.250,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			-				-	900.000.000,00	-	-	-	-	-		945.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	25.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	184.975.585,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		672.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPKD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				32 Perangkat Daerah	1.200.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.853.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPSE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPSE Pemerintah Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	174.270.430,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		162.963.962,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						616.439.806,00							669.980.357,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						616.439.806,00						-	669.980.357,00	
		[Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,10	2,90	2,90	3,00	616.439.806,00	-	-	-	-	-	-	669.980.357,00	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	616.439.806,00			-	-	-	-	669.980.357,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	8.383.979,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.273.231,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0018	Pemerintahan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadeta, interoperabilitas data dan kode referensi/ denketa data induk				75 %	31.468.861,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.333.804,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data				100 %	364.136.468,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143.585.962,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				32 Orang	111.020.579,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.400.357,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	80.427.859,00	Kota Cirebon, Kecamatan, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		182.385.983,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						1.077.821.728,00							608.194.389,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1.077.821.728,00						-	608.194.389,00	
		[Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	Persentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	100	98	93	100	1.077.821.728,00	-	-	-	-	-	-	608.194.389,00	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	785.837.812,00			-	-	-	-	425.555.467,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan	109.059.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.852.724,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisa Kebutuhan														
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisa Kebutuhan					3 Laporan	27.500.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.449.396,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian					32 Perangkat Daerah	496.285.348,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		188.702.843,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Telah ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian					1 Dokumen	150.291.864,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		121.550.504,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penebapan Pole Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	291.953.914,00			-	-	-	-	182.525.902,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Pemasangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Pemasangan Pemerintah Daerah berdasarkan pemasangan pole hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				6 Kegiatan	291.953.914,00	Kota Cirebon, Kasambi, Kasambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		182.525.902,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			J U M L A H					21.126.236.960,00							24.777.167.982,00	

